

BAB 1 PENDAHULUAN

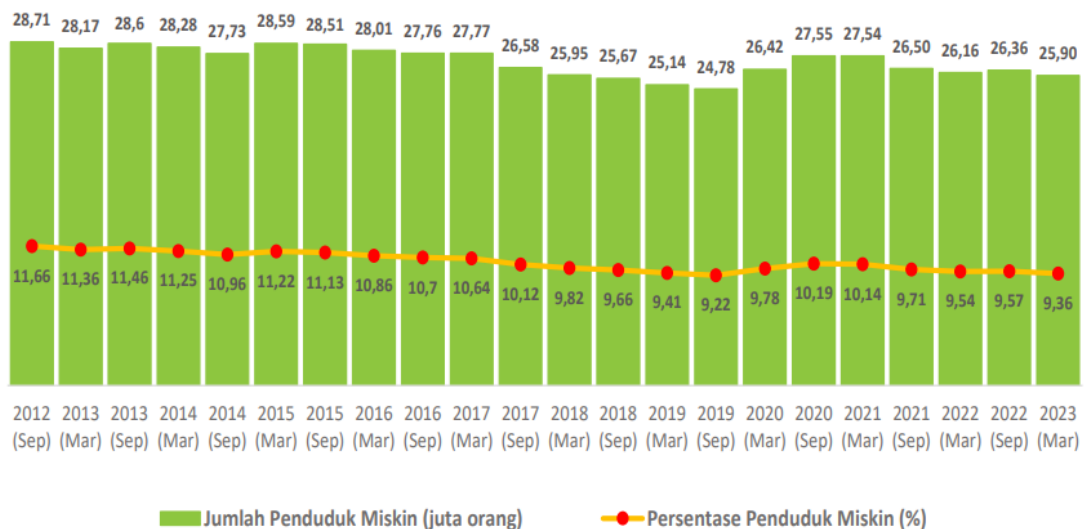
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi disemua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Menurut Khoiruddin (2014) kemiskinan adalah kondisi sosio-ekonomi yang menyatakan bahwa sebagian besar kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Angka kemiskinan di negara berkembang lebih banyak dibandingkan dengan negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Selain itu kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : pengangguran (Priseptian & Primandhana, 2022 ; Cholili, 2014) , kesehatan (Cholili, 2014), tingkat pendidikan (Teshome & Nana, 2014) dan rendahnya produktifitas (Wijekoon *et al.*, 2021).

Kemiskinan mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti munculnya permasalahan sosial yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, karena tolak ukur keberhasilan pertumbuhan perekonomian disuatu negara juga dilihat dari tinggi rendahnya angka kemiskinan (Khoiruddin, 2014). Perlunya penanggulangan kemiskinan karena dapat merusak rajutan hidup sosial sebagai, memecah belah masyarakat, memengaruhi stabilitas hidup sosial, dan terlebih dapat merusak harkat dan martabat manusia.

Menurut Sugiarti (2014) kemiskinan menjadi faktor pemicu bagi tindak kejahatan yang sering terjadi. Salah satu faktor kemiskinan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan yaitu keberadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu. Banyak masyarakat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya baik dalam kebutuhan primer ataupun sekunder, seperti bahan pokok beras, lauk

pauk, perlengkapan dapur, dan pakaian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang seharusnya tercapai untuk kelangsungan hidup sehari-hari, namun pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Hal tersebut yang menjadi penyebab faktor perekonomian menjadi salah satu pemicu timbulnya kejahatan disekitar. Dengan demikian perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk menekan masalah kemiskinan yang lebih kompleks.

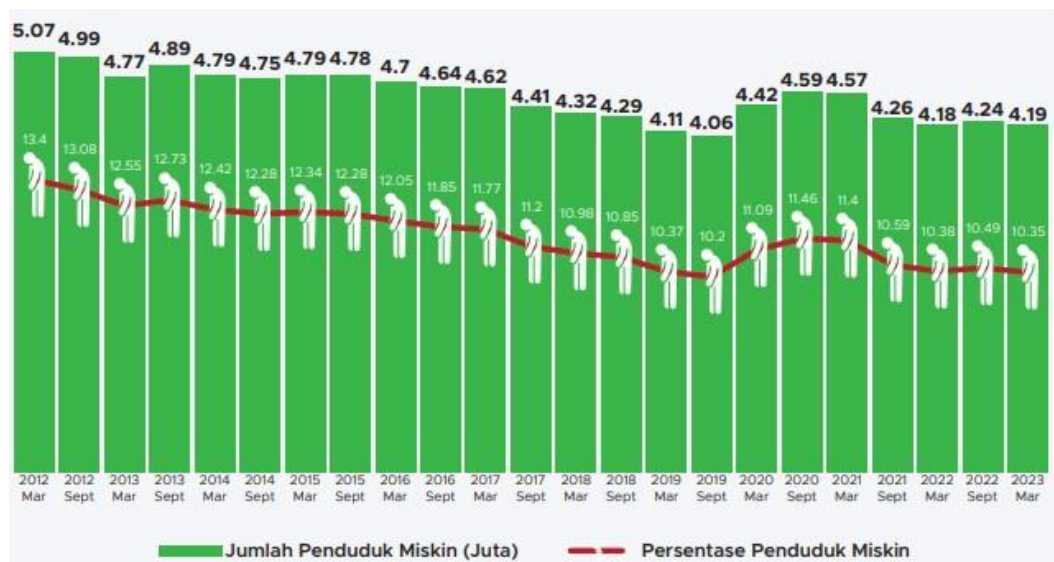


Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, September 2012–Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Data Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia menyatakan pada periode September 2012 – Maret 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan menurun baik dari sisi jumlah maupun presentase (Gambar 1.1). Akan tetapi periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai efek dari kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Selain itu

peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin periode Maret 2020 dan juga September 2020 dipicu oleh pandemi Covid-19 yang disertai pembatasan mobilitas penduduk (Badan Pusat Statistika Nasional, 2023).



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur, Maret 2012–Maret 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

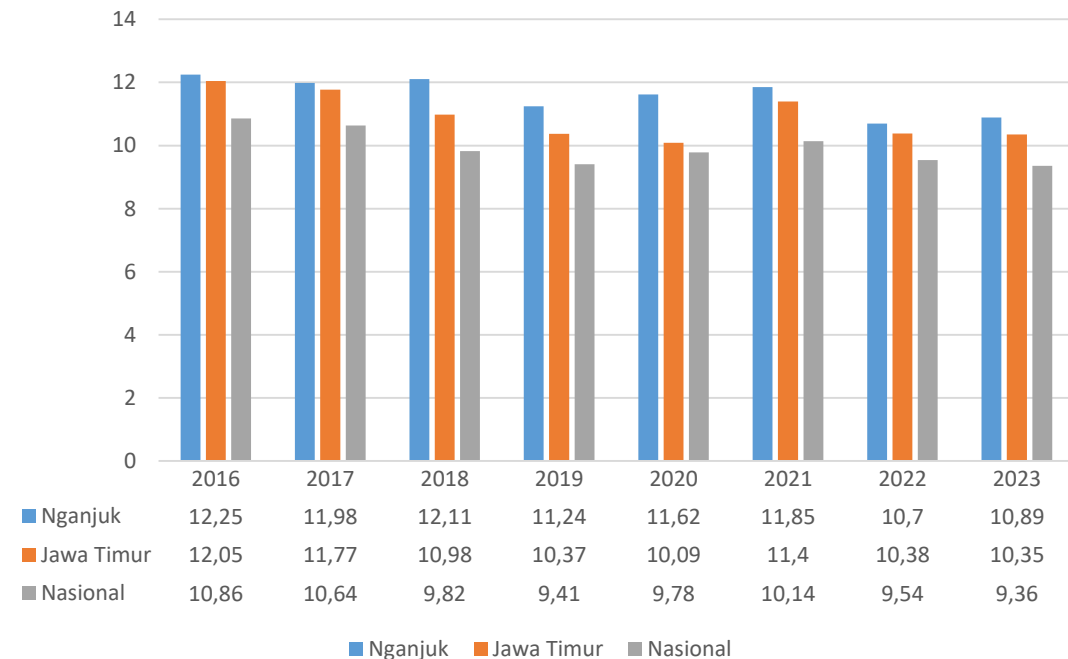
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada periode Maret 2012 – Maret 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan yang fluktuatif (Gambar 1.2). Kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Timur pada periode September 2013 dan Maret 2015. Sementara itu yang menjadi penyebab peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 adalah akibat dari adanya pandemi Covid-19, namun pada periode September 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan kembali (Badan Pusat Statistik & Jawa Timur, 2023).



Gambar 1. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk, Maret 2003–Maret 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Nganjuk, 2023

Data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Nganjuk pada periode Maret 2003 – Maret 2023 menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan yang fluktuatif (Gambar 1.3). Salah satu pemicu kenaikan jumlah dan presentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk yaitu adanya dampak Covid-19 yang menghantam sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, namun pada tahun 2022 Kabupaten Nganjuk perlahan mulai bangkit dan salah satu dampaknya kemiskinan mulai turun. Peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk tahun 2023 terdapat peran inflasi yang menjadi faktor pengaruhnya (Badan Pusat Statistik & Kabupaten Nganjuk, 2023). Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga disebagian besar kelompok pengeluaran, yang terbesar yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sebagian komoditas yang dipengaruhi inflasi adalah bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat turun dengan asumsi pendapatan yang sama.



Gambar 1. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2016–2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, 2024

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk yang relatif tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan angka kemiskinan di Indonesia (Gambar 1.4). Meskipun secara umum presentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih tergolong landai atau kurang tajam bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk sebesar 10,89 persen sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,35 persen dan Indonesia sebesar 9,36 persen. Perbandingan presentase penduduk miskin Jawa Timur terhadap Indonesia sebesar 0,99 persen, sedangkan presentasi penduduk miskin Kabupaten Nganjuk terhadap Provinsi Jawa Timur perbandingannya sebesar 0,54 persen.

Dampak dari pandemi Covid-19 dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, dari masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Selain itu ketidakpastian mengenai berakhirnya pandemi membuat ketidakpastian terkait penurunan pendapatan dan meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga menghambat perkembangan ekonomi masyarakat. Guna menangani dampak pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat melalui perlindungan sosial, dimana program sosial regular yang tidak dilakukan pengurangan anggaran dan jumlah target yang menjadi sasaran program tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menanggulangi potensi peningkatan jumlah penduduk miskin, sebagai akibat dari berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat terutama pada masyarakat yang rentan miskin. Selain itu prioritas tetap diberikan pada program-program yang dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, seperti Program Bantuan Pangan atau Tunai, dan program untuk Bansos warung sekitar pondok pesantren.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Kemiskinan Daerah Jawa Timur (2021), prioritas pengembangan untuk penanganan kemiskinan di pedesaan dibagi menjadi empat bagian untuk menetapkan wilayah-wilayah yang perlu mendapat prioritas. Wilayah yang masuk dalam kuadran 1 atau prioritas utama untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan adalah kabupaten-kabupaten yang memiliki tingkat penduduk miskin tinggi dan jumlah desa berkembang yang signifikan. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 13 kabupaten yang termasuk dalam wilayah intervensi 1 atau prioritas utama, dan Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas tersebut.

Di tingkat pusat ada dua kerangka kebijakan yang berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan kerangka kebijakan mikro (Rencana Pembangunan Kemiskinan Daerah Jawa Timur, 2021). Dalam konteks kerangka kebijakan makro, pemerintah harus tetap mempertahankan kestabilan inflasi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang produktif, meningkatkan iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian, serta memajukan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Sementara itu kerangka kebijakan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan terfokus pada dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi yang produktif. Kedua strategi ini perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam upaya membantu kelompok miskin dan rentan menjadi lebih produktif dan mampu secara ekonomi, sehingga dapat mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, program bantuan sosial dan jaminan sosial yang terintegrasi berbasis rumah tangga, keluarga atau individu. Kedua, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesejahteraan rumah tangga erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan (Sari *et al.*, 2014). Kesejahteraan rumah tangga adalah salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur kemiskinan sesuai versi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Kesejahteraan dipandang sebagai keadaan tercukupinya kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Zastrow (2015) kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sistem yang mencakup berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan semua anggota masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan diwujudkan dalam pembangunan berbasis masyarakat. Salah satu prinsip pendekatan non formal dalam pembangunan masyarakat adalah pendekatan berkelanjutan, salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat (Khoiruddin, 2014). Aktualisasi dalam bentuk program prioritas penanggulangan kemiskinan serta peningkatkan kesejahteraan yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Program Keluarga Harapan Plus, Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan), Program pembiayaan bagi masyarakat miskin JKN – PBI Daerah, Program Desa Sehat, SINANDO (Sinau Nang Deso), Program Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU), Restorasi Desa (penguatan kemandirian desa baik pemerintah desa, lembaga desa beserta masyarakat desa), Program Anti Kemiskinan (APP) dan program lainnya (RPKD Jawa Timur, 2021).

Salah satu program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah ada sejak tahun 2005 yaitu “*Anti Poverty Program (APP)*” yang kemudian berganti nama menjadi Peti Koin Bermantra (Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan

Sejahtera) pada tanggal 26 Februari 2022 dengan konsep yang lebih luas dan cakupan program yang lebih merata (Rizqi *et al.*, 2023). Program Peti Koin Bermantra merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dengan bertujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin melalui pendekatan pasar berbasis klaster (Pedoman Peti Koin Bermantra, 2014).

Tabel 1. 1 Pagu Anggaran Program Peti Koin Bermantra Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Pagu Anggaran Program Peti Koin Bermantra Provinsi Jawa Timur (rupiah)			
1.	2021	1.710.000.000	6.106.105.800	6.606.105.800	6.606.105.800
2.	2022	276.805.152	280.000.000	280.000.000	280.000.000
3.	2023	2.829.335.000	4.300.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000
4.	2024	1.710.000.000	6.106.105.800	6.606.105.800	6.606.105.800

Sumber : data sekunder (diolah), 2021

Tabel 1.1 menunjukkan pagu anggaran tiap sektor pada program Peti Koin Bermantra di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 – tahun 2024. Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Program Peti Koin Bermantra dilihat dari tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan. Anggaran yang dialokasikan pada kelompok masyarakat di seluruh Jawa Timur disetiap tahunnya tetap konsisten. Komitmen pemerintah yang terus berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program Peti Koin Bermantra karena melihat angka kemiskinan yang cenderung menurun. Oleh karena itu anggaran yang dialokasikan pada tersebut terus meningkat menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap mendukung kelangsungan program tersebut.

Ruang lingkup program Peti Koin Bermantra meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian, dan perdagangan, perkebunan, koperasi, usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan dan penetapan lokasi Program Peti Koin Bermantra dilaksanakan di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur menggunakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 1. 2 Daftar Penerima Program Peti Koin Bermantra Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023

No	Nama Kelompok Masyarakat	Tahun	Jumlah Anggota	Jenis Usaha	Alamat Pokmas
1	Sumber Mulyo	2019	25	Persewaan alat pertanian atau handtracktor	Desa Kedungsuko Kec. Sukomoro
2	Gemah Ripah	2019	4	Budidaya ikan lele	Desa Balongpacul Kec. Nganjuk
3	Anugerah Tani	2019	20	Persewaan alat pertanian atau Cultivator dan pompa air	Desa Sidokare, Kec. Rejoso
4	Berkah	2020	20	Budidaya porang	Desa Suru, Kec. Ngetos
5	Wijaya Kusuma	2020	16	Budidaya porang	Desa Suru, Kec. Ngetos
6	Sekar Arum	2020	4	Budidaya ikan lele	Desa Balongpacul Kec. Nganjuk
7	Mina Sejahtera	2021	4	Budidaya ikan lele	Desa Cerme, Kec. Pace
8	Guna Tani	2021	20	Persewaan alat pertanian/ handtracktor dan pompa air	Desa Sidokare, Kec. Rejoso
9	Sumber Koyo	2022	17	Persewaan alat pertanian/ handtracktor	Desa Gemenggeng, Kec. Pace
10	Mina Rahayu	2022	3	Budidaya ikan lele	Desa Cerme, Kec. Pace
11	Margo Mulyo	2023	13	Bidang Kehutanan	Desa Margopatut, Kec. Sawahan

No	Nama Kelompok Masyarakat	Tahun	Jumlah Anggota	Jenis Usaha	Alamat Pokmas
12	Sido Makmur	2023	15	Bidang Kehutanan	Desa Margopatut, Kec. Sawahan
13	Harapan Gilmulyo	2023	3	Bidang Perikanan	Desa Girirejo, Kec. Bagor
14	Pokdakan Alam Lestari	2023	10	Bidang Perikanan	Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom

Sumber : Laporan Triwulan PKM, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan daftar penerima program Peti Koin Bermantra tahun 2019 – 2023. Sektor yang mendominasi pada penerima program di Kabupaten Nganjuk yaitu sektor pertanian dan perikanan. Program Peti Koin Bermantra mulai berjalan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005. Pemilihan jenis usaha pada kelompok masyarakat penerima program disesuaikan dengan potensi dan keadaan lingkungan sekitar yang mendukung. Seperti halnya pada pokmas (kelompok masyarakat) penerima bantuan berupa budidaya ikan lele, yang pada dasarnya desa tersebut memiliki potensi budidaya dan lingkungan sekitar yang mendukung. Pada lingkungan tersebut, keberhasilan budidaya ikan lele dapat dikatakan tercapai karena dukungan ketersediaan air yang konsisten, baik selama musim penghujan maupun musim kemarau. Sementara itu pada pokmas penerima bantuan alat pertanian, yang pada dasarnya pertanian menjadi sektor utama di Kabupaten Nganjuk maka dari itu potensi dan lingkungan sekitar yang mendukung menjadikan alasan dipilihnya jenis usaha tersebut (BPS Nganjuk, 2022).

Program pemberdayaan masyarakat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga (Khoiruddin, 2014 ; Putra & Budhi, 2015 ; Hamdi, 2023). Meningkatnya pendapatan rumah tangga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga. Namun hasil yang berbeda menyatakan bahwa

program pemberdayaan masyarakat tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga (Wibowo, 2017 ; Iryani, 2017 ; Isyabillilah & Gustaman, 2023). Dilihat pada kondisi pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan yang terlihat relatif kecil menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan fenomena masalah yang menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk yang terbilang penurunannya masih landai, ditahun 2023 terjadi peningkatan angka kemiskinan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program anti kemiskinan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Program Peti Koin Bermantra Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk".

1.2 Rumusan Masalah

Program Peti Koin Bermantra bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur melalui pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat miskin, sehingga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah terdapat perbedaan konsumsi sebelum dan sesudah menerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk?

3. Apakah terdapat perbedaan saving sebelum dan sesudah menerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Batasan Masalah

Program Peti Koin Bermantra ini sudah berjalan selama 19 tahun di Provinsi Jawa Timur dengan sektor program sebanyak 9 sektor, yang sudah berlangsung di 18 Kabupaten pada Provinsi Jawa Timur. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dampak program yang dimaksud adalah perbedaan sebelum dan sesudah menerima program Peti Koin Bermantra.
2. Kelompok masyarakat penerima program Peti Koin Bermantra yang dipilih pada tahun 2020 – 2023, yaitu pokmas Sumber Mulyo, Mina Sejahtera, Mina Rahayu, Harapan Gilimulyo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dampak program Peti Koin Bermantra terhadap pendapatan penerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk
2. Mengetahui dampak program Peti Koin Bermantra terhadap konsumsi penerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk
3. Mengetahui dampak program Peti Koin Bermantra terhadap saving penerima program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Nganjuk

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didapatkan setelah penelitian terselesaikan yang dimaksudkan untuk kegunaan nantinya, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan,

pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan lebih lanjut bagi penelitian-penelitian terkait pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dampak adanya program pengentasan kemiskinan terhadap kesejahteraan rumah tangga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat mengenai program-program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan perubahan pada kesejahteraan rumah tangga.